

Perang total dan mobilisasi sumber daya nasional dalam Perang Dunia II: Pembelajaran strategis bagi ketahanan nasional Indonesia

Total war and the mobilization of national resources during World War II: Strategic insights for Indonesia's national resilience

Joni Widjayanto, Eko Susetyo, Ghazalie*, Vande Leonardo

*Corresponding author, Email: thamsonbrothers@gmail.com

Universitas Pertahanan, FVFJ+G4H, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, 16810, Jawa Barat, Indonesia

Paper received: 14-04-2025; revised: 27-06-2025; accepted: 24-08-2025; published: 24-10-2025

How to cite (APA Style): Widjayanto, J., Susetyo, E., Ghazalie, G., & Leonardo, V. (2025). Perang total dan mobilisasi sumber daya nasional dalam Perang Dunia II: Pembelajaran strategis bagi ketahanan nasional Indonesia. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 8(2), 441-451. DOI: 10.17977/um022v8i22025p441-451

Abstract

This study highlights the importance of transforming Indonesia's national resilience in the face of contemporary threats such as cyberattacks, disinformation, ecological disasters, and geopolitical dynamics. Employing a qualitative approach with an intrinsic case study design, data were collected through policy analysis, interviews, and participatory observation. The findings reveal institutional fragmentation, weak intersectoral coordination, limited public participation, and threat literacy. The study proposes a conceptual model of national resilience comprising five dimensions: institutional structure, sectoral integration, adaptive capacity, public awareness, and geopolitical orientation. It emphasizes that without synergy among these elements, the resilience system remains vulnerable. Therefore, a new paradigm is needed more adaptive and participatory focusing on institutional reform, community empowerment, and a sharper geopolitical strategy in the Indo-Pacific region.

Keywords: national resilience; adaptive governance; security paradigm; geopolitical strategy

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pentingnya transformasi ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman kontemporer seperti serangan siber, disinformasi, bencana ekologis, dan dinamika geopolitik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui analisis kebijakan, wawancara, dan observasi partisipatif. Hasil menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antar sektor, serta minimnya partisipasi masyarakat dan literasi ancaman. Studi ini mengembangkan model konseptual ketahanan nasional yang terdiri atas lima dimensi: struktur kelembagaan, integrasi sektor, kapasitas adaptif, kesadaran masyarakat, dan orientasi geopolitik. Ditekankan bahwa tanpa sinergi antar elemen tersebut, sistem ketahanan akan tetap rentan. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang lebih adaptif dan partisipatif, dengan fokus pada reformasi institusional, penguatan peran masyarakat, dan strategi geopolitik yang lebih tajam di kawasan Indo-Pasifik.

Kata kunci: ketahanan nasional; tata kelola adaptif; paradigma keamanan; strategi geopolitik

PENDAHULUAN

Perang Dunia II (1939–1945) merupakan titik balik dalam sejarah umat manusia yang menandai pergeseran paradigma konflik dari skala regional ke ranah global. Konflik ini melibatkan

lebih dari 30 negara dan mengerahkan lebih dari 100 juta personel militer dari berbagai benua, menjadikannya salah satu peperangan paling destruktif dan kompleks sepanjang abad ke-20 (Overy, 1995). Eskalasi konflik yang demikian luas mendorong negara-negara yang terlibat untuk mengerahkan seluruh kapasitas nasional, tidak hanya kekuatan militer semata, melainkan seluruh sektor kehidupan bangsa. Fenomena ini melahirkan konsep perang total (*total war*), di mana aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi diintegrasikan secara strategis untuk mendukung upaya militer (Chickering & Förster, 2003). Dalam konteks ini, ketahanan nasional dipahami sebagai entitas multidimensional yang dibangun atas dasar sinergi lintas sektor, bukan sekadar kekuatan pertahanan konvensional.

Perkembangan studi mengenai ketahanan nasional selama beberapa dekade terakhir mencerminkan peningkatan perhatian terhadap kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh negara-negara modern. Dalam tatanan global yang terus berubah, munculnya ancaman non-konvensional seperti serangan siber, disinformasi massif, terorisme transnasional, dan dampak perubahan iklim menjadi tantangan utama bagi stabilitas nasional (Baldwin, 1997; Nye, 2010). Dalam merespons hal ini, konsep ketahanan telah bergeser dari perspektif semata-mata militeristik menjadi kerangka multidisipliner yang menekankan pentingnya resilien institusional, kapasitas adaptif, dan kepercayaan sosial. Studi oleh Boin et al. (2010) misalnya, menegaskan bahwa ketahanan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan kapasitas sistem pemerintahan dalam mengelola krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah dan kontestasi global yang membentuk konstruksi sosial dan politik negara-bangsa.

Dalam konteks Indonesia, narasi ketahanan nasional memiliki dimensi historis yang khas. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun fondasi ketahanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaannya dihadapkan pada kompleksitas implementasi dan keterbatasan integrasi antar-sektor. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan penetrasi teknologi informasi dalam kehidupan publik, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana Indonesia dapat membangun sistem pertahanan nasional yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga resilien secara sosial, politik, dan ekonomi?

Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana mengonstruksi model ketahanan nasional yang mampu menjawab tantangan kontemporer secara holistik. Ketahanan tidak lagi dapat direduksi sebagai domain pertahanan semata, melainkan harus dipahami sebagai kemampuan menyeluruh suatu bangsa dalam menghadapi, menyerap, dan beradaptasi terhadap berbagai bentuk gangguan internal maupun eksternal (Briguglio et al., 2009). Di sinilah pentingnya pendekatan interdisipliner yang tidak hanya mengandalkan strategi pertahanan, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, kohesi sosial, serta peran aktif masyarakat sipil. Penelitian ini memfokuskan pada urgensi pembentukan sistem ketahanan nasional yang berbasis pada pembelajaran sejarah, seperti yang ditunjukkan pada periode Perang Dunia II, namun direkontekstualisasikan dengan kondisi kekinian Indonesia.

Solusi umum yang ditawarkan oleh banyak studi sebelumnya adalah pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam perumusan strategi ketahanan nasional. Misalnya, penelitian oleh Chester et al. (2021) menyarankan perlunya pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* dalam manajemen krisis nasional. Model ini menekankan koordinasi antara aktor negara, sektor swasta, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan sebagai suatu ekosistem ketahanan. Demikian pula, studi oleh Duit (2016) menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas kebijakan publik serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan jangka panjang. Namun, penerapan solusi ini seringkali menemui kendala dalam bentuk fragmentasi kelembagaan dan perbedaan

prioritas antar aktor yang terlibat. Oleh karena itu, masih dibutuhkan pendekatan yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan serta potensi spesifik Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa solusi spesifik telah ditawarkan oleh literatur ilmiah untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penguatan kapasitas institusi pemerintahan dalam menghadapi krisis multidimensi. Misalnya, Kapucu dan Garayev (2011) menekankan pentingnya desain organisasi publik yang adaptif dan kemampuan birokrasi dalam merespons dinamika ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Sementara itu, studi oleh Hanlon dan Christie (2018) menyoroti peran teknologi digital dalam memperkuat sistem deteksi dini dan komunikasi krisis, yang dapat menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Di sisi lain, pentingnya investasi dalam pendidikan kebangsaan dan literasi informasi juga ditegaskan oleh Lusthaus et al. (2002), yang menunjukkan bahwa ketahanan sosial sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman serta keterlibatan mereka dalam menjaga keutuhan negara.

Literatur yang berfokus pada pengalaman negara-negara lain dalam membangun ketahanan nasional dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia. Studi perbandingan antara ketahanan nasional Korea Selatan dan Finlandia misalnya, memberikan pelajaran penting mengenai strategi pelibatan masyarakat dalam sistem pertahanan semesta (*total defense*). Korea Selatan berhasil mengintegrasikan pendidikan bela negara ke dalam sistem pendidikan formal, sementara Finlandia mengembangkan konsep "*comprehensive security*" yang melibatkan semua sektor masyarakat dalam upaya mempertahankan negara (Simola, 2020). Namun, sebagian besar literatur ini masih bersifat normatif dan kurang menyoroti konteks spesifik negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kompleksitas geografis dan demografis yang tinggi. Di sinilah munculnya kesenjangan penelitian yang signifikan bagaimana menerjemahkan konsep-konsep ketahanan nasional yang berkembang di negara maju ke dalam kerangka pembangunan ketahanan nasional di negara berkembang yang pluralistik dan dinamis seperti Indonesia.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi model konseptual ketahanan nasional yang bersifat holistik dan adaptif, dengan menjadikan pelajaran sejarah, khususnya pengalaman Perang Dunia II sebagai pijakan dalam memahami dinamika ancaman kontemporer. Keunikan pendekatan ini terletak pada integrasi dimensi historis dan kontemporer untuk menyusun kerangka ketahanan nasional yang berbasis pada realitas Indonesia. Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam memperluas pemahaman ketahanan nasional tidak hanya sebagai respon terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai mekanisme internal untuk memperkuat integrasi nasional, meningkatkan kapasitas adaptasi institusi, dan memperkuat peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara. Ruang lingkup studi ini mencakup kajian literatur konseptual, analisis kebijakan nasional, dan perbandingan strategis dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengembangkan sistem ketahanan nasional yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis dan praktis bagi perumusan strategi ketahanan nasional Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pembangunan sistem ketahanan nasional Indonesia dalam konteks ancaman kontemporer, serta pembelajaran dari pengalaman sejarah Perang Dunia II. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan studi untuk memahami fenomena sosial dan kebijakan dalam konteks spesifik dan kompleks (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus intrinsik memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan memaknai elemen-elemen kunci dari sistem ketahanan nasional Indonesia sebagai sebuah unit analisis yang utuh dan terikat pada waktu, tempat, dan makna tertentu (Stake, 1995).

Unit analisis utama dalam studi ini adalah kebijakan dan praktik ketahanan nasional Indonesia pada periode 2004–2024, dengan fokus pada interaksi lintas sektor yang membentuk

ketahanan nasional, seperti kebijakan pertahanan, tata kelola pemerintahan, pendidikan kebangsaan, dan peran masyarakat sipil. Unit analisis ini juga mencakup dimensi temporal dan kontekstual, yaitu bagaimana kebijakan dan praktik tersebut merespons dinamika global seperti perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, dan konstelasi geopolitik regional. Dalam kerangka ini, pengalaman sejarah Perang Dunia II digunakan sebagai titik rujuk historis untuk memahami bagaimana integrasi sektor sipil dan militer pernah dioperasionalkan dalam konteks perang total (Chickering & Förster, 2003), dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam konteks damai saat ini.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: analisis dokumen, dan observasi partisipatif terbatas. Analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen kebijakan lain dari Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi prinsip, strategi, dan tujuan yang membentuk narasi ketahanan nasional Indonesia (Bowen, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang berulang serta mengungkapkan narasi ideologis di balik kebijakan yang dianalisis.

Observasi partisipatif terbatas dilakukan dalam dua kegiatan strategis, yaitu pelatihan bela negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan, serta seminar nasional tentang ketahanan digital yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Observasi ini memberikan gambaran langsung mengenai implementasi konsep ketahanan nasional di lapangan, serta bagaimana partisipasi aktor sipil dimediasi oleh perangkat kelembagaan. Catatan lapangan disusun secara sistematis untuk menggambarkan interaksi sosial, simbol, dan narasi yang muncul selama kegiatan berlangsung, yang kemudian digunakan sebagai data pelengkap dalam analisis tematik.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan induktif dengan empat tahapan utama: reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan konstruksi makna. Pada tahap pertama, data dari dokumen, wawancara, dan observasi direduksi untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan menyoroti bagian-bagian yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan dimensi ketahanan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dimensi militer, sosial, politik, ekonomi, dan informasi. Kategori ini diadaptasi dari kerangka kerja yang dikembangkan oleh Boin et al. (2010) dan Duit (2016), yang menekankan pentingnya integrasi multidimensi dalam memahami ketahanan. Interpretasi dilakukan dengan menelusuri hubungan antar kategori dan menarik makna yang konsisten dengan kerangka teoretik dan hasil wawancara. Tahap akhir adalah konstruksi makna, di mana temuan dianalisis dalam konteks teoritis yang lebih luas untuk merumuskan proposisi tentang bagaimana sistem ketahanan nasional Indonesia dibentuk dan dijalankan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan lintas-negara secara selektif untuk memberikan perspektif eksternal terhadap praktik ketahanan nasional Indonesia. Dua negara yang dijadikan pembanding adalah Finlandia dan Korea Selatan, yang dipilih karena keberhasilan mereka dalam membangun model ketahanan yang inklusif dan partisipatif. Studi perbandingan ini dilakukan melalui analisis literatur sekunder dan laporan kebijakan internasional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia. Metode perbandingan ini mengikuti prinsip analisis analogi struktural (*structural analogy*), yaitu membandingkan elemen-elemen yang secara fungsional serupa dalam struktur kelembagaan dan budaya strategis masing-masing negara (George & Bennett, 2005).

Kredibilitas dan keabsahan data dijaga melalui empat strategi utama yaitu triangulasi sumber data, audit trail, member checking, dan reflektivitas peneliti. Triangulasi dilakukan untuk

memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak berasal dari satu sumber atau metode tunggal, melainkan merupakan konvergensi dari berbagai data. Audit trail disusun dalam bentuk dokumentasi proses penelitian secara rinci, termasuk catatan analisis, log wawancara, dan keputusan interpretatif. *Member checking* dilakukan dengan meminta tanggapan dari sebagian informan terhadap hasil sementara untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan perspektif mereka. Reflektivitas dijaga dengan menyusun jurnal reflektif peneliti selama proses penelitian untuk mengidentifikasi potensi bias dan posisi subjektif peneliti.

Secara metodologis, integrasi antara pendekatan kualitatif mendalam dan kerangka historis-konseptual menjadikan penelitian ini mampu menangkap kompleksitas ketahanan nasional sebagai fenomena dinamis dan kontekstual. Penggunaan data primer dan sekunder, serta kombinasi antara analisis isi, analisis tematik, dan perbandingan internasional, memberikan kedalaman analisis yang diperlukan untuk memahami tidak hanya apa yang dilakukan oleh negara, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan ketahanan nasional dijalankan dengan cara tertentu. Dengan demikian, metodologi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis yang solid dalam diskursus kebijakan ketahanan nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan nasional Indonesia mengalami dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor historis, institusional, dan sosial-politik. Penemuan utama dari analisis data menunjukkan bahwa integrasi sektor-sektor strategis dalam sistem ketahanan nasional masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ketahanan holistik yang adaptif sebagaimana yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti ancaman siber, disinformasi, dan ketegangan geopolitik regional. Temuan ini sejalan dengan peringatan Baldwin (1997) yang menyatakan bahwa keamanan nasional tidak dapat dipahami secara sempit sebagai isu militeristik, melainkan sebagai persoalan lintas sektor yang menuntut sinergi dan koordinasi lintas aktor.

Analisis terhadap dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan dokumen RPJMN menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah mengakui pentingnya pendekatan pertahanan semesta. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pendekatan ini belum dioperasionalkan secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan. Dalam wawancara dengan pejabat Kementerian Pertahanan, terungkap bahwa banyak daerah masih menafsirkan pertahanan negara sebagai domain eksklusif militer tanpa melibatkan sektor sipil secara substantif. Hal ini sejalan dengan catatan Chickering dan Förster (2003) tentang bagaimana warisan perang total menciptakan ketergantungan berlebihan pada militer sebagai aktor utama pertahanan, meskipun konteks kontemporer menuntut desentralisasi dan keterlibatan multipihak.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam inisiatif ketahanan nasional menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah. Dalam kegiatan observasi partisipatif di pelatihan bela negara, misalnya, ditemukan bahwa semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap ancaman nasional cukup tinggi di kalangan peserta muda, terutama dari wilayah urban. Namun, wawancara dengan aktivis masyarakat sipil menunjukkan bahwa belum tersedia ruang formal yang memadai bagi warga untuk berkontribusi secara strategis dalam pembangunan ketahanan, terutama dalam isu-isu seperti keamanan digital dan ketahanan informasi. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam penerapan prinsip "*whole-of-society*" sebagaimana dikembangkan oleh Chester et al. (2021), yang menekankan pentingnya kolaborasi inklusif antara negara dan masyarakat.

Hasil analisis tematik terhadap narasi kebijakan dan hasil wawancara menghasilkan lima kategori utama yang membentuk fondasi sistem ketahanan nasional Indonesia: 1) struktur kelembagaan dan tata kelola, 2) integrasi lintas sektor, 3) kapasitas adaptif institusi, 4) literasi ancaman masyarakat, dan 5) orientasi geopolitik strategis. Setiap kategori ini menunjukkan dinamika internal yang saling berhubungan dan membentuk lanskap pertahanan nasional yang

kompleks. Dalam dimensi kelembagaan, ditemukan bahwa meskipun koordinasi antar kementerian telah diperkuat melalui kebijakan lintas sektor seperti Rencana Induk Keamanan Siber Nasional, namun masih terjadi tumpang tindih wewenang dan inkonsistensi eksekusi di tingkat pelaksana. Ini menguatkan argumen Kapucu dan Garayev (2011) tentang pentingnya desain kelembagaan yang adaptif dan responsif dalam menghadapi kompleksitas ancaman.

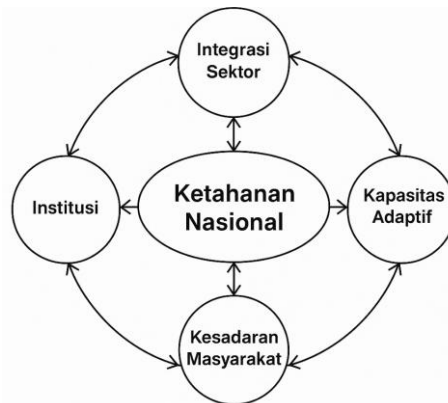
Pada aspek integrasi lintas sektor, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Beberapa kementerian telah memiliki rencana aksi ketahanan masing-masing, tetapi tidak selalu diselaraskan dalam satu kerangka nasional yang kohesif. Sebagai contoh, Kementerian Kominfo telah meluncurkan program literasi digital nasional, namun inisiatif tersebut berjalan relatif terpisah dari program ketahanan informasi yang dirancang oleh BSSN. Ketidaksinkronan ini mengurangi efektivitas intervensi dan memperlemah kemampuan negara dalam membangun ketahanan informasi yang sistemik. Dalam konteks ini, penelitian Lusthaus et al. (2002) relevan, karena mereka menekankan bahwa koordinasi lintas sektor memerlukan kepemimpinan strategis dan struktur tata kelola yang mengintegrasikan visi bersama.

Dalam hal kapasitas adaptif institusi, temuan menunjukkan bahwa institusi keamanan dan pertahanan relatif lebih siap dalam menghadapi ancaman konvensional dibandingkan dengan ancaman non-tradisional seperti disinformasi atau bencana ekologis. Wawancara dengan pejabat BNPB menunjukkan bahwa masih banyak kelembagaan daerah yang belum memiliki mekanisme respons krisis berbasis data dan teknologi. Rendahnya adopsi sistem deteksi dini dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Hal ini sejalan dengan kritik Hanlon dan Christie (2018) tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat kapasitas tanggap dan pemulihan dalam konteks ketahanan nasional.

Dimensi literasi ancaman di masyarakat juga memperlihatkan kerentanan signifikan. Data observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan bela negara masih memahami ancaman nasional dalam kerangka klasik, invasi militer dan pemberontakan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas ancaman kontemporer. Sementara itu, survei pendahuluan terhadap literasi digital menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami risiko keamanan siber dan cara mengidentifikasinya. Minimnya pendidikan kebangsaan dan keterbatasan kurikulum bela negara dalam sistem pendidikan formal memperburuk situasi ini. Kondisi ini mengonfirmasi kesimpulan dari Simola (2020), yang menunjukkan bahwa efektivitas ketahanan nasional bergantung pada tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan warga negara terhadap beragam spektrum ancaman.

Dalam hal orientasi geopolitik strategis, hasil wawancara dengan akademisi dan diplomat senior menunjukkan bahwa Indonesia belum secara eksplisit mengartikulasikan posisi strategisnya di tengah rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun secara retorika Indonesia mengusung prinsip non-blok dan diplomasi aktif, kebijakan pertahanan nasional belum sepenuhnya merefleksikan posisi strategis ini dalam bentuk investasi pertahanan yang relevan, seperti penguatan aliansi regional non-militer dan pengembangan diplomasi ketahanan. Penemuan ini sejalan dengan tinjauan Nye (2010) yang menekankan pentingnya soft power dan diplomasi strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan yang holistik dalam lingkungan global yang saling tergantung.

Dalam upaya memahami secara lebih dalam hubungan antara kelima kategori tersebut, penelitian ini menyusun sebuah model konseptual yang menggambarkan interaksi dinamis antar elemen ketahanan nasional. Model ini didasarkan pada pendekatan sistem kompleks adaptif yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik, keterhubungan antar aktor, dan kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Gambar 1 menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan dan kapasitas adaptif menjadi fondasi struktural, sementara integrasi lintas sektor dan literasi masyarakat membentuk jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan realitas sosial. Di atas semua itu, orientasi geopolitik menjadi kerangka makro yang membimbing arah dan prioritas strategi ketahanan nasional.



Gambar 1. Model Konseptual Ketahanan Indonesia Berbasis Pendekatan Sistem Kompleks Adaptif

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana kelima elemen tersebut berfungsi secara sinergis dan berkelanjutan. Ketika salah satu elemen mengalami disfungsi, maka kapasitas sistem secara keseluruhan akan menurun. Sebagai contoh, rendahnya literasi masyarakat terhadap ancaman digital dapat melemahkan efektivitas kebijakan pertahanan siber, meskipun infrastruktur teknologinya telah tersedia. Sebaliknya, koordinasi kelembagaan yang kuat tanpa dukungan masyarakat akan menciptakan sistem pertahanan yang elitis dan rentan terhadap resistensi publik.

Penemuan ini juga mempertegas pentingnya pembelajaran dari sejarah, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman perang total pada Perang Dunia II. Studi Chickering dan Förster (2003) menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengintegrasikan sektor sipil dan militer dalam satu sistem pertahanan nasional memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam kondisi krisis berkepanjangan. Namun, dalam konteks damai dan demokratis seperti Indonesia, integrasi ini harus dilakukan secara partisipatif dan berbasis hak asasi, bukan melalui mobilisasi koersif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pilar dalam pembangunan ketahanan nasional ke depan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman empiris dan konseptual yang kuat mengenai tantangan dan peluang dalam membangun sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh dan adaptif. Temuan ini menegaskan perlunya transformasi paradigma dari ketahanan berbasis kekuatan militer menuju ketahanan nasional berbasis sistem adaptif yang terintegrasi dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk menghadapi ancaman kontemporer, tetapi juga untuk membangun landasan jangka panjang bagi ketahanan negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai kompleksitas dan dinamika sistem ketahanan nasional Indonesia yang sedang berkembang. Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah mengakui perlunya strategi pertahanan nasional yang komprehensif dan terintegrasi, implementasi model tersebut masih bersifat tidak konsisten di antara sektor dan wilayah. Bagian diskusi ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan temuan tersebut dalam wacana literatur ketahanan nasional yang lebih luas, mengeksplorasi implikasi teoritis dari model konseptual yang dikembangkan (lihat Gambar 1), serta menelaah faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi kapasitas negara dalam membangun sistem ketahanan yang partisipatif dan adaptif.

Fragmentasi Kelembagaan dan Inkonsistensi Kebijakan

Salah satu temuan paling krusial dari penelitian ini adalah adanya fragmentasi kelembagaan yang berkelanjutan dalam tata kelola ketahanan di Indonesia. Meskipun secara

yuridis, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta telah diatur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, prinsip ini belum dijalankan secara konsisten di seluruh kementerian dan pemerintahan daerah. Temuan ini menguatkan kritik Kapucu dan Garayev (2011) yang menyoroti kerentanan sistem manajemen krisis terpusat yang tidak diiringi dengan koordinasi antar lembaga, terutama di negara dengan struktur desentralisasi administratif seperti Indonesia.

Fragmentasi tersebut terlihat dalam tumpang tindihnya mandat kelembagaan dan lemahnya sinkronisasi tujuan kebijakan. Seperti diungkapkan pada bagian hasil, inisiatif literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, misalnya, masih terpisah dari kebijakan pertahanan siber yang dikembangkan oleh BSSN. Isolasi semacam ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan, terjadinya duplikasi program, dan ketiadaan visi strategis yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan peringatan Lusthaus et al. (2002) bahwa performa kelembagaan sangat ditentukan oleh koherensi struktur tata kelola dan kejelasan peran antarinstansi.

Kapasitas Adaptif dan Integrasi Teknologi

Tema penting lainnya dari studi ini adalah keterbatasan kapasitas adaptif institusi, khususnya dalam menghadapi ancaman-ancaman baru seperti disinformasi, bencana yang dipicu perubahan iklim, serta kerentanan terhadap serangan siber. Meskipun terdapat kemajuan dalam modernisasi militer dan sistem penanggulangan bencana, kesiapan institusional terhadap ancaman non-tradisional masih relatif rendah. Temuan ini memperkuat argumen Hanlon dan Christie (2018) yang menyatakan bahwa ketahanan nasional di era digital sangat bergantung pada kapasitas institusi negara dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pengambilan keputusan dan operasi lapangan.

Walaupun sejumlah sistem peringatan dini telah diterapkan di tingkat daerah, upaya tersebut masih kurang konsisten dan sangat tergantung pada pembiayaan jangka pendek. Selain itu, wawancara dengan pejabat lembaga terkait menunjukkan bahwa transfer pengetahuan antar lembaga dan antara tingkat pemerintahan masih terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme pembelajaran institusional yang berkelanjutan, sebagaimana ditekankan oleh Boin et al. (2010). Tanpa mekanisme tersebut, respon kelembagaan cenderung reaktif dan bersifat temporer, bukan antisipatif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Literasi Ancaman

Data juga menyoroti adanya kesenjangan besar dalam pelibatan masyarakat sipil dalam upaya pembangunan ketahanan nasional. Meskipun pendekatan “whole-of-society” telah banyak digaungkan dalam wacana akademik dan dokumen kebijakan (Chester et al., 2021), implementasinya di Indonesia masih minim. Observasi pada pelatihan bela negara menunjukkan bahwa pemahaman publik terhadap ancaman nasional masih terbatas pada kerangka militeristik, tanpa mempertimbangkan dimensi ancaman kontemporer yang lebih kompleks.

Temuan ini menggemakan hasil studi Simola (2020) tentang model “keamanan menyeluruh” Finlandia, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pendidikan publik dalam membentuk negara yang tangguh. Di Indonesia, belum adanya platform formal dan terstruktur untuk keterlibatan sipil, serta lemahnya strategi komunikasi publik dari pemerintah, menghambat terbentuknya kesadaran kolektif terhadap berbagai jenis ancaman. Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap ketahanan terhadap ancaman hibrida seperti kampanye disinformasi dan polarisasi sosial.

Dalam kerangka ini, temuan juga sejalan dengan pemikiran Nye (2010) yang menekankan pentingnya soft power dan konsensus sosial dalam membangun ketahanan jangka panjang. Literasi masyarakat terhadap isu-isu keamanan nasional, terutama dalam hal literasi digital dan informasi, harus diposisikan sebagai prioritas strategis negara, bukan sekadar aspek edukatif.

Warisan Sejarah dan Hambatan Kultural

Salah satu kontribusi penting dari studi ini adalah perhatiannya terhadap pengaruh warisan sejarah dan narasi budaya dalam membentuk perilaku kelembagaan dan persepsi publik. Pengalaman perang total dalam Perang Dunia II, seperti dibahas dalam pendahuluan dan bagian hasil, menunjukkan bagaimana negara-negara memobilisasi sumber daya sipil dan militer secara terintegrasi dalam menghadapi krisis eksistensial (Chickering & Förster, 2003). Namun, mengadaptasi strategi perang tersebut ke dalam konteks damai dan demokratis membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan politik masyarakat.

Dalam kasus Indonesia, pendekatan ketahanan nasional masih banyak dipengaruhi oleh warisan otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan. Budaya birokrasi yang hierarkis dan militeristik sering kali menghambat terciptanya tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif. Akibatnya, banyak kebijakan ketahanan cenderung berbasis pada pendekatan top-down ketimbang berbasis jaringan yang inklusif. Fenomena ini mencerminkan apa yang digambarkan Duit (2016) sebagai hambatan struktural terhadap tata kelola adaptif di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi.

Lebih lanjut, data wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara—terutama di kalangan organisasi masyarakat sipil—masih rendah. Kekurangan ini membatasi potensi ko-produksi ketahanan antara negara dan warga negara, sebagaimana ditegaskan oleh Baldwin (1997) bahwa keamanan nasional modern bergantung pada relasi kolaboratif antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan aktif menjadi syarat utama dalam reformasi strategi ketahanan nasional ke depan.

Ambiguitas Geopolitik dan Posisi Kawasan

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang belum secara eksplisit tergambarkan dalam kebijakan pertahanan nasional. Walaupun Indonesia mempertahankan prinsip non-blok dan diplomasi aktif, orientasi geopolitik tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan konkret yang menyangkut kerja sama ketahanan non-militer, seperti tanggap bencana, keamanan maritim, dan perlindungan infrastruktur digital.

Ketiadaan arah strategis yang jelas dapat mengurangi efektivitas Indonesia dalam membangun kemitraan regional, serta melemahkan posisi tawar dalam forum multilateral. Temuan ini sejalan dengan teori smart power dari Nye (2010), yang menekankan pentingnya sinergi antara kekuatan keras dan kekuatan lunak dalam membentuk tata dunia. Strategi ketahanan nasional Indonesia akan lebih efektif jika diintegrasikan dengan agenda diplomasi luar negeri secara sistematis.

Sintesis Sistemik dan Implikasi Teoretis

Model konseptual yang dikembangkan dalam studi ini memberikan kerangka teoritis baru untuk memahami ketahanan nasional sebagai sistem adaptif kompleks. Lima dimensi utama institusi, integrasi sektor, kapasitas adaptif, kesadaran masyarakat, dan orientasi geopolitik menunjukkan bahwa ketahanan bukanlah atribut tetap, tetapi hasil dari keseimbangan dinamis yang dibentuk oleh interaksi timbal balik dan koherensi sistem.

Pendekatan ini berbeda dengan model ketahanan tradisional yang bersifat linear dan reaktif. Sebaliknya, ia mendukung pandangan baru dalam literatur yang menempatkan ketahanan sebagai proses yang dibangun melalui pembelajaran, inovasi, dan fleksibilitas sistemik (Boin et al., 2010; Duit, 2016). Dalam praktik kebijakan, hal ini berarti bahwa strategi ketahanan nasional tidak hanya perlu merespons ancaman, tetapi juga harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi

dengan konteks yang berubah melalui koordinasi multi-aktor, evaluasi berkelanjutan, dan penggunaan intelijen strategis.

Implikasi dari model ini bersifat dua arah: pertama, ia dapat digunakan sebagai alat diagnostik bagi pembuat kebijakan dalam menilai kinerja dan koherensi sistem ketahanan nasional. Kedua, ia menyediakan kerangka analisis untuk penelitian komparatif lintas negara yang menghadapi tantangan ketahanan serupa. Dengan menempatkan Indonesia dalam kerangka analitis yang lebih luas, studi ini memberikan kontribusi pada wacana global mengenai bagaimana negara berkembang dapat membangun arsitektur ketahanan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di abad ke-21.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bahwa sistem ketahanan nasional Indonesia berada dalam proses transformasi yang belum sepenuhnya berhasil menjawab kompleksitas ancaman kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang mengarah pada pertahanan semesta dan pendekatan ketahanan holistik, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, koordinatif, dan kultural. Fragmentasi kelembagaan, lemahnya integrasi lintas sektor, rendahnya kapasitas adaptif institusi terhadap ancaman non-konvensional, serta kurangnya literasi ancaman di masyarakat menjadi tantangan mendasar yang harus segera diatasi. Model konseptual yang dikembangkan dalam studi ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dibangun secara sektoral dan statis, melainkan melalui pendekatan sistem kompleks adaptif yang memerlukan sinergi antar dimensi: kelembagaan, integrasi sektor, kapasitas adaptasi, kesadaran publik, dan orientasi geopolitik. Ketiadaan salah satu elemen ini akan melemahkan keseluruhan sistem. Dalam konteks ini, ketahanan harus dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang menuntut keberlanjutan, pembelajaran kelembagaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Pengalaman historis seperti Perang Dunia II memberikan pembelajaran penting bahwa ketahanan nasional yang efektif hanya dapat dicapai melalui integrasi antara sektor militer dan sipil dalam kerangka yang demokratis, inklusif, dan berbasis nilai-nilai partisipatif. Namun, adaptasi terhadap konteks Indonesia menuntut rekontekstualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam semangat demokrasi pascareformasi dan tantangan globalisasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. *Review of International Studies*, 23(1), 5–26. <https://doi.org/10.1017/S0260210597000053>
- Boin, A., McConnell, A., & 't Hart, P. (2010). Crisis exploitation: Political and policy impacts of framing contests. *Journal of European Public Policy*, 17(1), 81–106. <https://doi.org/10.1080/13501760903382607>
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. *Oxford Development Studies*, 37(3), 229–247. <https://doi.org/10.1080/13600810903089893>
- Chester, M. V., Pincetl, S., & Elizabeth, C. (2021). Towards resilient infrastructure systems. *Nature Sustainability*, 4(8), 673–680. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00735-7>
- Chickering, R., & Förster, S. (2003). *The shadows of total war: Europe, East Asia, and the United States, 1919–1939*. Cambridge University Press.
- Clausewitz, C. V. (1832). *On war*. (M. Howard & P. Paret, Eds.). Princeton University Press.
- Connelly, A. L. (2010). Indonesia in ASEAN: Regional leadership aspirations in the midst of institutional challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 32(1), 1–28.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). SAGE Publications.
- Duit, A. (2016). Resilience thinking: Lessons for public administration. *Public Administration*, 94(2), 364–380. <https://doi.org/10.1111/padm.12182>

- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Hanlon, R. J., & Christie, K. (2018). *Freedom from fear, freedom from want: An introduction to human security*. University of Toronto Press.
- Hastings, M. (2011). *Inferno: The world at war, 1939–1945*. Alfred A. Knopf.
- Kahin, G. M. (2003). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2011). Collaborative decision-making in emergency and disaster management. *International Journal of Public Administration*, 34(6), 366–375. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.561477>
- Kennedy, D. M. (1999). *Freedom from fear: The American people in depression and war, 1929–1945*. Oxford University Press.
- Kershaw, I. (2000). *The Nazi dictatorship: Problems and perspectives of interpretation*. Arnold.
- Lusthaus, C., Adrien, M. H., Anderson, G., Carden, F., & Montalván, G. P. (2002). *Organizational assessment: A framework for improving performance*. IDRC.
- Marwick, A. (1974). *War and social change in the Twentieth Century*. Macmillan.
- Mazower, M. (1998). *Dark continent: Europe's Twentieth Century*. Vintage.
- Nye, J. S. (2010). *The future of power*. PublicAffairs.
- Overly, R. (1995). *Why the allies won*. W.W. Norton & Company.
- Simola, H. (2020). Comprehensive security in Finland: A national approach in a changing international environment. *Finnish Journal of International Affairs*, 1(1), 25–38.